

Judul : Kasus Gagal Ginjal Akut Dibahas Lagi: DPR Diminta Bikin Pansus
Tanggal : Jumat, 27 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kasus Gagal Ginjal Akut Dibahas Lagi

DPR Diminta Bikin Pansus

Senayan mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan santunan kepada korban kasus gagal ginjal akut. Hal itu sebagaimana hasil kesepakatan rapat kerja (raker) DPR dengan Pemerintah pada 2 November 2022.

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan, Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan kasus gagal ginjal akut. Termasuk, memberi perhatian ke korban.

"Kemenkes akan memberikan santunan dan memberikan biaya pengobatan kepada seluruh korban gagal ginjal. Ini akan menjadi komitmen kami," tegas Charles usai audiensi dengan Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan Korban Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/1).

Menurut Charles, DPR sepakat dengan keluarga korban bahwa negara harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Karena itu, negara harus menuntaskan permasalahan tersebut serta bisa menjamin kesehatan dan keamanan obat dan makanan bagi rakyatnya.

"Negara adalah pihak yang memiliki perangkat untuk memastikan masyarakat bisa mengonsumsi obat-obatan dan makanan secara aman, tetapi ini tidak dilakukan dengan baik," kata Politikus PDIP ini.

Sementara, Anggota Tim Kuasa Hukum keluarga korban gagal ginjal akut, Al Araf mengatakan, tragedi gagal ginjal akut pada anak belum selesai. Meskipun kasus barunya sudah tidak ada lagi.

"Kami mendesak DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengungkap dan menyelesaikan tragedi obat beracun

yang telah menyebabkan 324 orang anak menjadi korban," kata Al Araf di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Al Araf menyebut, alasan pihaknya mendorong pembentukan Pansus kasus gagal ginjal akut. Pertama, belum ada standar pengujian kadar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (DEG) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dia bilang, kasus gagal ginjal misterius ditemukan pada Januari 2022, sudah setahun. Tapi, belum ada langkah konkret dari BPOM dalam melakukan standarisasi pengujian etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG).

"Sejatinya, kasus ini hanya dipandang sebelah mata oleh BPOM karena tidak ada bukti konkret perbaikan sistem," kritiknya.

Juga, kata Al Araf, penyakit penyerta akibat gagal ginjal akut juga belum menjadi perhatian khusus. Skema pembiayaan pasien Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) di Indonesia yang ditawarkan Kemenkes adalah pembayaran umum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Skema pembiayaan yang ditawarkan oleh Menkes hanya fokus pada gangguan gagal ginjal tidak pada penyakit penyerta yang diakibatkan oleh GGAPA," tuturnya.

Al Araf menuturkan, bukan rahasia umum BPJS merupakan iuran yang dibayarkan oleh

korban setiap bulan. Sehingga bukan bantuan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemerintah.

Selain itu, Al Araf menyayangkan Pemerintah belum menetapkan tragedi obat beracun sebagai kejadian luar biasa (KLB). Seharusnya, Pemerintah bisa menetapkan KLB karena angka kematian terkait gagal ginjal akut di Indonesia telah mencapai lebih dari 55 persen dari kasus yang ada.

Dia merujuk data Per 16 November 2022 dari 324 kasus gagal ginjal akut. Dari data itu, 199 di antaranya telah meninggal dunia sehingga kriteria angka kematian kasus suatu penyakit (*Case Fatality Rate*) dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kematian 50 persen telah terpenuhi.

Seperti diketahui, sebanyak 200 anak meninggal dunia akibat obat sirup cair yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DG). Data tersebut merujuk pada data Kemenkes per 23 November 2022. Adapun jumlah korban yang menderita gagal ginjal akut sebanyak 324 anak.

Sejumlah keluarga korban obat sirup beracun kemudian menggugat sembilan pihak yang dinilai bertanggung jawab. Mereka adalah Kemenkes dan BPOM. Kemudian, PT Afi Farma Pharmaceutical Industry dan PT Universal Pharmaceutical Industries selaku produsen obat.

Selanjutnya, lima perusahaan penyuplai bahan baku obat yakni, PT Megasetia Agung Kimia, CV Budiarta, PT Logicom Solution, CV Mega Integra, dan PT Tirta Buana Kemudo. Para pengugat meminta agar tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil. ■ TIF

LPEI Didorong Segera Siapkan Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor

ANGGOTA Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) segera mempersiapkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Lewat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang baru disahkan, kita juga memberikan penguatan bagi LPEI dengan dapat menerima DHE atas transaksi ekspor debitur LPEI dan masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia," ujar Puteri saat melakukan kunjungan kerja spesifik bersama LPEI di PT Pearland, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (19/1) lalu.

Sebelumnya, kata Puteri, hanya bank dalam negeri saja yang dapat menerima DHE.

"Kini dengan mandat Undang-undang PPSK, LPEI mampu menjalankan hal tersebut. Tapi harus dipersiapkan sebaik mungkin supaya tidak menimbulkan gejolak bagi eksportir maupun debitur LPEI," jelasnya.

Devisa hasil ekspor merupakan aset keuangan yang diperoleh atas hasil ekspor seperti mata uang asing.

Puteri juga mendorong LPEI menggenjot DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia agar semakin meningkatkan cadangan devisa dan nilai tukar Rupiah.

"Ini karena masih banyak



Puteri Komarudin

Duta Alam (SDA) masuk dalam sistem keuangan Indonesia. Ini karena kontribusi dari sektor ekspor non-SDA jadi penyumbang besar terhadap devisa kita," ujar Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR ini.

Lebih lanjut, Puteri juga menekankan agar fasilitas pembiayaan dari LPEI ini dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Karena pembiayaan LPEI ini asalnya dari APBN atau uang rakyat. Bahkan, tahun lalu, kita kembali memberikan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada LPEI sebesar Rp 1 triliun. Yang artinya uang ini harus memberikan manfaat bagi rakyat. Makanya, kita harus awasi betul penggunaannya," tegas Wakil Rakyat Senayan Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta ini).